

TUMPUKAN WARISAN MASALAH PANGLIMA TNI BARU

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono resmi diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Surat Presiden (Supres) secara resmi diantar langsung oleh Mensesneg Pratikno ke Gedung DPR Senayan, Senin (28/11). Diharapkan persetujuan dari DPR RI sudah digedok sebelum masa reses pada 15 Desember mendarat. Meski 'jalan mulus' sudah terbuka bagi Laksamana Yudo, tapi tumpukan warisan masalah di tubuh TNI telah menanti. Mulai dari tragedi berdarah Kanjuruhan--data terbaru 4 prajurit sudah mengakui melakukan kekerasan. Ada juga tantangan internal Angkatan Laut yaitu membangun dan memperkuat pengamanan laut untuk mensukseskan tol laut. Dari sisi SDM, penunjukkan anggota TNI aktif sebagai PJ Kepala Daerah dan membengkaknya jumlah Perwira tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) non-job juga menjadi kendala tersendiri. Tak hanya itu, ada problematika lama dari zaman dulu yang belum juga terurai yaitu evaluasi keamanan di Papua.

(Baca Hal 11)

YUDO MARGONO

Menjabat sebagai **KSAL ke-27 sejak 20 Mei 2020**.
Lahir di **Madiun, 26 November 1965**.

PENDIDIKAN :

- AAL (1988); Kursus Korbantem (1989); Kursus Perencanaan Operasi Amphibi (1990); Kursus Pariksa (1992); Dikspespa/Kom Angkatan 6 (1992/1993); Diklapa II/Koum Angkatan 11 (1997/1998); Seskoal A-40 (2003); Sesko TNI A-38 (2011); serta Lemhannas RI PPR A-52 (2014).

JEJAK KARIER DAN KIPRAH:

- Panglima Koarmada 1 (Pangkoarmada 1), Yudo sigap memimpin Satgas Laut dalam operasi SAR pencarian bangkai pesawat Lion Air JT-160 yang jatuh di perairan Laut Jawa pada 2019 lalu.
- Dengan kerja keras Satgas di bawah kepemimpinannya, tak butuh waktu lama untuk menemukan serpihan serta CVR dari pesawat nahas tersebut.
- Pangkogabwilhan 1 pada 2019. Meski terbilang organisasi baru di TNI, Yudo mampu mengantisipasi sejumlah tantangan berkaitan dengan keamanan tidak hanya di kawasan laut, tetapi juga darat dan udara.
- Memimpin Indonesia menghadapi beberapa kali krisis di perairan Natuna yang diklaim sebagai wilayah Cina. Berulang kali ia memerintahkan kapal-kapal TNI untuk melakukan penegakkan hukum di wilayah yang masih masuk kawasan Indonesia tersebut.
- Memimpin proses pemulihan dan rehabilitasi WNI dari Wuhan di awal pandemi COVID-19 pada 2020 lalu.
- Memimpin operasional RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran.

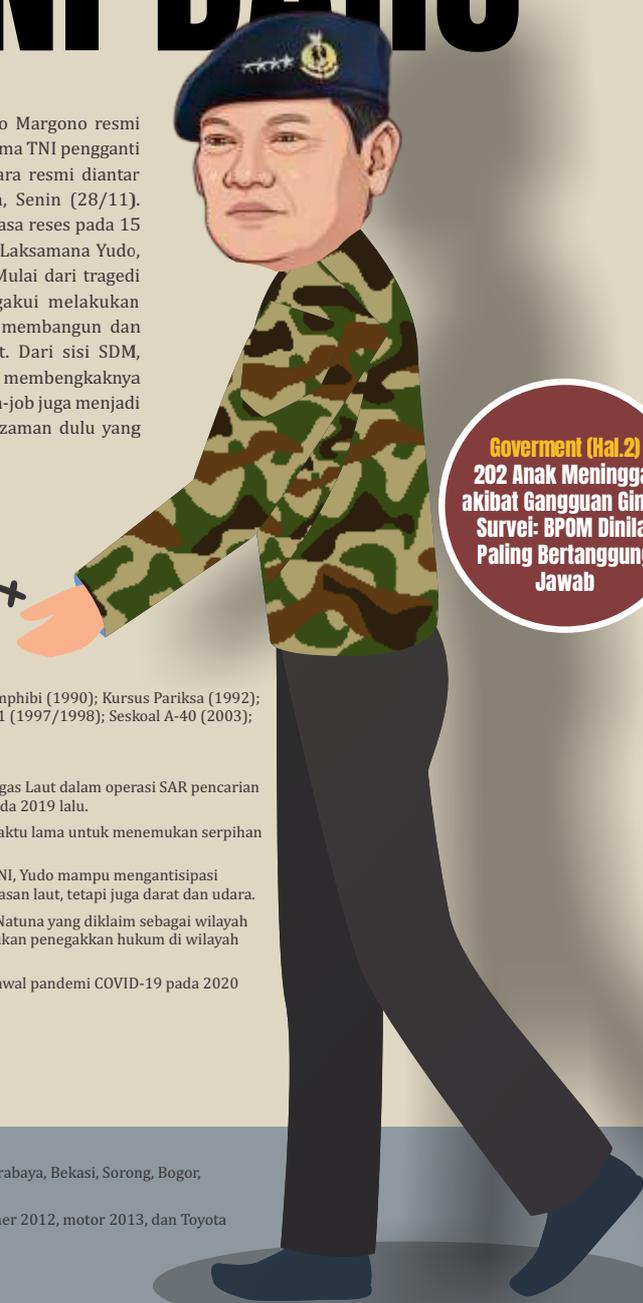
JUMLAH HARTA

- Periode tahun 2020: **Rp 11.364.872.854**
- Periode tahun 2021: **Rp 17.970.088.086**.

Berikut rincian tahun 2021:

- Tanah dan bangunan: 51 bidang tanah dan bangunan di Sidoarjo, Surabaya, Bekasi, Sorong, Bogor, Tangerang, Madiun dengan **nilai Rp 10.450.959.000**;
- Alat transportasi dan mesin: motor tahun 2010, mobil Toyota Fortuner 2012, motor 2013, dan Toyota Alphard 2021 dengan **nilai Rp 1.630.000.000**;
- Surat berharga lainnya: **Rp 365.000.000**;
- Kas dan setara kas: **Rp 5.524.129.086**;

PANGLIMA TNI



**Government (Hal.2)
202 Anak Meninggal
akibat Gangguan Ginjal
Survei: BPOM Dinilai
Paling Bertanggung
Jawab**

202 Anak Meninggal akibat Gangguan Ginjal

Survei: BPOM Dinilai Paling Bertanggung Jawab

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan sebanyak 202 anak di Indonesia meninggal akibat gangguan ginjal akut per Senin (28/11). Menurut survei terbaru, lembaga Indikator Politik Indonesia menghasilkan publik mengatakan BPOM lah yang paling bertanggung-jawab atas kasus ini.

"Total masih 324 dari 27 provinsi. Kemudian, sebanyak 113 anak telah sembuh dan 9 anak masih dalam perawatan akibat penyakit tersebut," kata Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril.

Syahril mencatat penambahan dua kasus meninggal dari jumlah pasien yang sebelumnya dirawat di rumah sakit sebanyak 11 anak. "Jadi tidak ada penambahan kasus baru," klaimnya.

Berdasar data Kemenkes, provinsi yang melaporkan kasus gangguan ginjal akut terbanyak ialah DKI Jakarta dengan 83 anak. Diikuti Jawa Barat dengan 41 kasus dan Aceh melaporkan 32 kasus. Adapun Jawa Timur melaporkan 25 kasus, Banten 21 kasus, Sumatera Barat 20 kasus, Bali 16 kasus, Sumatera Utara 15 kasus, Sulawesi Selatan sembilan kasus, serta Jambi delapan kasus. Selanjutnya Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masing-masing enam kasus, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah masing-masing lima kasus.

Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau (Kepri), dan Lampung masing-masing empat kasus, Sementara Kalimantan Utara melaporkan tiga kasus serta Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah masing-masing dua kasus. Terakhir, yakni Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat masing-masing satu kasus.

Kemenkes dan Pabrik Obat Juga Salah

Sebelumnya, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei opini publik terkait siapa yang paling bertanggungjawab atas kasus gagal ginjal akut pada anak. Hasilnya BPOM dinilai sebagai pihak yang paling bertanggungjawab. Sebanyak 38,9 persen menyatakan BPOM sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Disusul oleh Kementerian Kesehatan dengan angka 31,4 persen.

"BPOM dan Kemenkes dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab," ujar Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi saat rilis survei, dikutip Senin (28/11).

Sementara, 19 persen responden menilai perusahaan obat bertanggung jawab, kemudian Presiden Joko Widodo 2,8 persen. Lainnya 0,2 persen dan tidak jawab 7,7 persen. Sementara itu, kepuasan publik terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menangani kasus gagal ginjal akut cukup tinggi. Yaitu 2,8 persen menyatakan sangat puas, 47,2 persen cukup puas.

Adapun yang kurang puas dengan Kemenkes ada 39,6 persen, dan tidak puas sama sekali 4,8 persen. Responden yang tidak menjawab 5,5 persen. "Separuh warga yang mengetahui merasa cukup atau sangat puas atas kinerja Kementerian Kesehatan dalam penanganan kasus tersebut, tapi yang kurang puas juga sangat besar, sekitar 44,4 persen," ujar Burhanuddin.

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso berpendapat bahwa kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak tergolong kasus kejahatan kemanusiaan.



Arsip Foto. Pengurus Dharma Wanita membesuk anak yang mengalami gangguan ginjal akut di RSUD Zainoel Abidin, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

"Jadi ini saya pinjam kata Bu Penny [Kepala BPOM], ini kejahatan kemanusiaan," kata Piprim.

Piprim menilai sudah sepatutnya Etilen Glikol (EG) serta Dietilen Glikol (DEG) tak boleh ada dalam obat sirup. Sebab, EG dan DEG merupakan bentuk cemaran. Terlebih, saat ini ditemukan obat yang EG dan DEG yang melebihi ambang batas aman. "Tadi kan sudah sebutkan. EG dan DEG tak akan dituliskan di kandungan. Ditulisnya senyawa aktif. EG ED ini cemaran enggak boleh ada," kata dia.

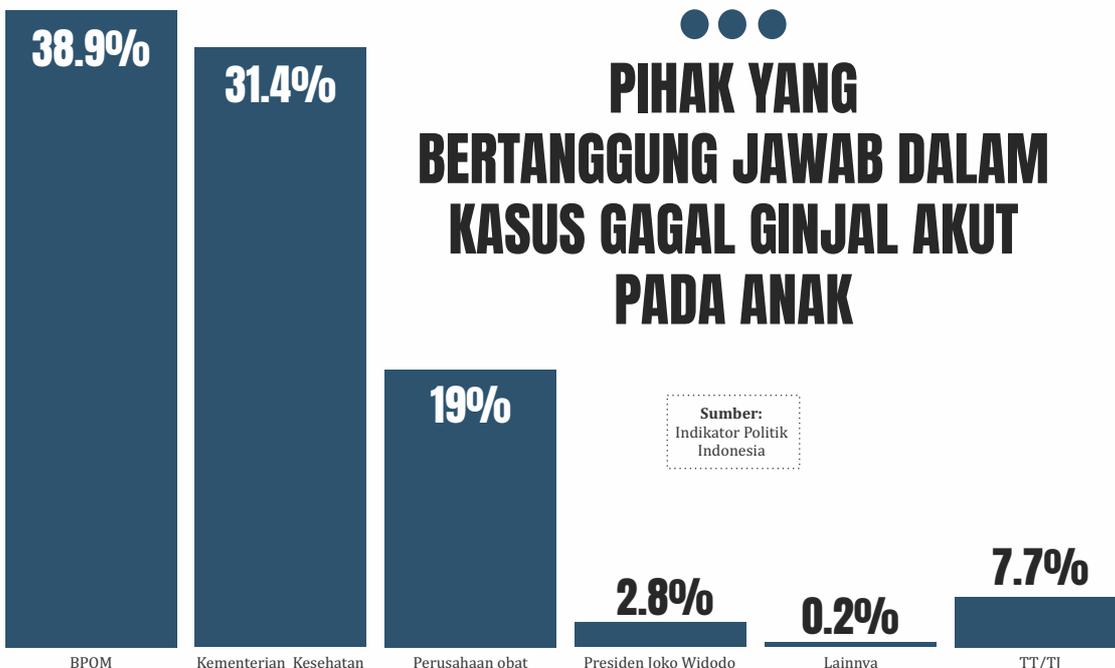
Piprim lantas menceritakan bahwa kasus gagal ginjal ini mulai naik drastis sejak Agustus sampai September. Kala itu, para dokter anak yang menangani mengaku kewalahan dan kebingungan mencari penyebab utama kasus. Sebab, gejalanya kala itu mirip seperti terjangkit virus corona (Covid-19) namun dalam kondisi tak keluar air kencing sama sekali alias urine.

Alhasil, Piprim mengatakan

pihaknya melakukan penelitian lebih lanjut mencari penyebabnya. Ia lantas menyimpulkan kasus ini berpotensi besar disebabkan oleh intoksikasi atau keracunan dalam cemaran senyawa dalam sejumlah obat sirup. "Setelah diskusi dengan tim di Gambia. Baru kita mengarah ke EG. Bahwa kami memeriksa darah pasien untuk toksikologi. Dan ini banyak positif kadarnya," kata dia.

Sebagaimana diketahui, EG dan DEG menjadi biang kerok maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang menyebabkan kematian. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat 324 anak di Indonesia terkena gagal ginjal akut. Sebanyak 190 di antaranya dilaporkan meninggal dunia.

Gagal ginjal akut sendiri merupakan kondisi penurunan fungsi ginjal secara tiba-tiba. Jika terlambat ditangani, kondisi ini bisa berujung fatal, termasuk menyebabkan kematian. (wid,rls,lpt/dya)



Geger Omnibus Law RUU Kesehatan Penolakan Meluas, Draf yang Beredar Bukan dari DPR



Aksi para tenaga kesehatan terkait penolakan Omnibus Law RUU Kesehatan di berbagai wilayah Indonesia, Senin (28/11/2022). (Foto:istimewa)

JAKARTA - DPR mengklaim draf naskah omnibus law RUU Kesehatan yang saat ini beredar di publik bukan berasal dari pihaknya. Meski demikian, penolakan dari berbagai organisasi meluas di seluruh wilayah tanah air.

"Bahwa sampai hari ini memang belum ada draf resmi dari RUU Kesehatan. Kalau yang beredar ya, kita juga tidak tahu siapa yang mengedarkan, isinya seperti apa. Saya secara pribadi juga belum membaca," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris saat menerima perwakilan lima organisasi profesi yang melakukan aksi damai penolakan RUU Kesehatan di depan Gedung DPR, Senin (28/11).

Charles menjamin DPR akan mendengarkan aspirasi dari tenaga kesehatan jika RUU Kesehatan tersebut disetujui masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Dalam kesempatan yang sama, politikus PDIP sekaligus Wakil Ketua Baleg M Nurdin memastikan Baleg menyusun naskah akademik RUU Kesehatan melalui rapat dengar pendapat umum. Dari situ kemudian baru akan disusun RUU Kesehatan.

Nurdin menyebut, Baleg DPR sudah mengundang sebanyak 28 pemangku kebijakan untuk mendengarkan aspirasinya terkait penyusunan naskah akademik Omnibus Law Kesehatan. "Perlu diketahui bahwa kami masih nyusun, belum selesai. Jadi saya lihat, baca tuntutan, orang ini belum ada kok," kata Nurdin.

Juru Bicara Aliansi Nasional Nakes dan Mahasiswa Kesehatan Seluruh Indonesia Mahesa Paranadipa yang ikut hadir dalam audiensi bersama anggota DPR itu memprotes RUU Kesehatan yang dinilai terlalu tergesa-gesa dimasukkan ke dalam prolegnas.

Menurut Mahesa, masih ada isu-isu yang harus dibicarakan di tingkat organisasi profesi. Dengan demikian, ia meminta agar DPR tidak memasukkan RUU tersebut dalam prolegnas 2023-2024. Ia juga menilai belum ada urgensi atas RUU Kesehatan Omnibuslaw.

"Belum ada urgensi untuk RUU Kesehatan, masih ada UU yang sudah existing. Dan kami organisasi prosedur

selama ini sudah berkolaborasi bersinergitas dengan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat sampai daerah, untuk sama-sama menuntaskan masalah kesehatan," kata Mahesa.

Mahesa mengatakan ada sejumlah substansi dalam RUU Kesehatan yang mengancam sistem kesehatan nasional. Selain itu, ia menilai proses penyusunan RUU Kesehatan ini tidak melibatkan para anggota organisasi profesi alias tidak transparan.

"Kami melihat ada upaya-upaya untuk memasukkan liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan. Kalau kita bicara kesehatan hari ini, kalau semua dibebaskan tanpa kontrol sama sekali, tanpa memperhatikan mutu pelayanan kesehatan. Maka ancamannya adalah seluruh rakyat," ujarnya.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan telah memanggil asosiasi apoteker, dokter, perawat, bidan, pengelola rumah sakit, hingga Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan berbagai masukan terkait RUU Kesehatan.

"Setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak, kami harap segera terbentuk panitia kerja penyusunan RUU Kesehatan," kata Supratman Andi Agtas. "Kami berharap di masa sidang ini bisa mengambil keputusan untuk selanjutnya dikirim ke pemerintah menunggu surat presiden."

Salah satu perkumpulan dokter yang menjadi perhatian Supratman Andi Agtas bernama Dokter Susah Praktik. "Ini perhimpunan dokter yang susah praktik," ujarnya. Dokter Susah Praktik, menurut dia, terdiri atas dokter-dokter muda dan dokter spesialis yang kembali dari studi di luar negeri, namun mengalami kesulitan dalam program adaptasi.

Pemerintah Tunggu Kejelasan

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah belum memahami secara detail substansi omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Sebab, merupakan inisiatif dari DPR. "Itu kan sepertinya akan jadi

inisiatif DPR. Itu juga belum, jadi kita juga masih menunggu saja dari DPR," ujar Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/11).

Ia pun meminta publik, terutama para dokter dan tenaga kesehatan, untuk menunggu draf resmi dari rancangan peraturan perundangan itu keluar. Dengan begitu, seluruh pihak nantinya bisa membahas dan memberi masukan secara jelas. "Saya rasa tunggu dulu, deh, seperti apa. Nanti kalau sudah keluar, kita bisa diskusi dengan DPR dan pemerintah. Ini sekarang kan juga belum jelas isinya apa," ucap Budi.

Wacana RUU Kesehatan dengan konsep omnibus law menuai reaksi. Pengurus PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PP Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Iqbal Mochtar menilai Rancangan Undang-

Undang (RUU) Kesehatan dengan konsep omnibus law yang sedang disusun DPR minim kejelasan. Urgensinya pun dipertanyakan.

Ia mengatakan urgensi penggabungan UU adalah mengganti dan sinergikan berbagai UU terkait. Terdapat 12 UU bidang kesehatan akan dihapus dan digantikan oleh omnibus law RUU Kesehatan ini. Namun, sebelum memutuskan pembuatan UU baru, kata dia, semestinya ada penjelasan rasional dan transparan terkait alasan penggantian UU lama.

"Apakah UU lama sudah tidak relevan atau mengandung konflik satu dengan lainnya, harus ada penjelasan dan telaah ilmiah terkait aspek filosofis, yuridis dan sosial penggantian UU ini. Sehingga ada alasan substansial dan relevan penggantian UU," kata Iqbal. (wid,ist,ant/dya)

15 POIN KRUSIAL RUU KESEHATAN (OMNIBUS LAW)

1. Dokumen NA dan Draft RUU Kesehatan dan DIM yang sudah berada di masyarakat, tidak jelas bersumber dari mana dan tidak ada yang mengakui menerbitkannya (tanpa identitas).
2. Organisasi profesi kesehatan sudah diajak membahas NA dan RUU Kesehatan (Omnibus Law) oleh Kemenkes (?) yang mem-blended 13 UU bidang Kesehatan eksisting, dalam satu RUU Kesehatan (Omnibus) yang sumbernya tidak jelas.
3. Pejabat Kemenkes, terkesan juga kebingungan dengan munculnya NA dan Draft RUU Kesehatan tersebut, yang menurut beritanya berasal dari Baleg DPR, dan sudah masuk dalam Short list Prolegnas 2023.DPR (Badan Legislasi) sudah mengundang beberapa kelompok masyarakat dalam RDP untuk mendapatkan masukan terkait RUU Kesehatan tersebut.
4. Dalam Raker dengan Menkes dan RDP dengan BKKBN, BPOM, BPJS Kesehatan dan DJSN 22 November 2022, terbuka informasi bahwa Draft RUU Kesehatan (Omnibus Law) dimaksud, belum disusun oleh Baleg, dan Raker serta RDP dimaksud adalah forum untuk menghimpun substansi penyusunan RUU Kesehatan.
5. Baleg DPR mengakui, inisiatif pengusulan RUU Kesehatan itu berasal dari DPR, tanpa melalui Komisi IX yang membidangi Kesehatan, BKKBN, BPJS dan DJSN.
6. Tidak semua anggota DPR yang ikut rapat (anggota Baleg) memahami tentang adanya rencana penyusunan RUU Kesehatan oleh Baleg. Hal itu ditandai dengan permintaan agar RUU Kesehatan dibagikan Pemerintah kepada DPR (Baleg).
7. Simpang siur tentang NA dan RUU Kesehatan itu, menimbulkan spekulasi, apakah RUU Kesehatan (Omnibus Law) itu keinginan Pemerintah tetapi dengan menggunakan tangan DPR (Baleg), tanpa melibatkan Komisi IX DPR, atau murni inisiatif DPR (Baleg) yang disetujui Pemerintah, atau sebenarnya Pemerintah tidak setuju tetapi "tidak enak " dengan Baleg DPR.
8. Jika mencermati NA dan RUU Kesehatan (Omnibus Law) yang sampai juga ke tangan penulis, isinya memang "porak poranda". NA berisikan kumpulan narasi dari berbagai UU kesehatan dan UU SJSN/BPJS yang ingin dikerangkeng dalam RUU Kesehatan dalam satu bus yang sama (Omnibus).
9. Perlu diketahui beberapa UU Kesehatan yang juga di blended adalah produk tahun 2014 keatas. Artinya masih baru dan masih dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan ada UU lingkup kesehatan itu (seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan), yang PP nya belum sempat disusun.
10. Tidak jelas arah yang dituju dari RUU Kesehatan itu dari aspek kepentingan keselamatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Kalau menyimak apa yang disampaikan pimpinan Raker Kemenkes dengan Baleg DPR, pimpinan Rapat yang juga pimpinan Baleg, membuat arsitektur agar terbentuknya Komite Kebijakan Kesehatan. Pesis seperti Komite Kebijakan Keuangan. Terkesan perlu lembaga baru lagi, birokrasi baru dan menimbulkan persoalan baru.
11. Tidak konsistennya Baleg DPR yang bersemangat menyusun RUU Kesehatan (Omnibus Law), tetapi dalam short list Prolegnas 2023, juga akan membahas RUU Tentang Kefarmasian dan RUU Tentang Pengawasan Obat
12. Sebaiknya Baleg DPR focus pada penyelesaian RUU Tentang Kefarmasian dan RUU Tentang Pengawasan Obat dan Makanan mengingat kasus Gagal Ginja Akut pada anak akibat penggunaan bahan baku obat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan lemahnya sistem pengawasan bahan baku zat tambahan obat.
13. Kemenkes sebenarnya sudah bekerja on the track, dengan arsitektur 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan yang tertuang dalam RPJM 2022-2024. Sebagaimana sudah dipaparkan oleh Wamenkes pada Raker dengan Baleg DPR.
14. Perlu adanya konfirmasi kepada Presiden Jokowi tentang RUU Kesehatan (Omnibus Law) ini. Apakah sudah ada pembicaraan antara Pimpinan DPR dengan Presiden. Jika Presiden tidak mengetahui, Menkes tidak melaporkan, maka akan heboh di masyarakat. Sebagaimana muncul NA dan RUU Pendidikan, yang Presiden tidak "dilaporkan" oleh Mendikbud.
15. Dengan kelima belas poin diatas, wajarlah jika 5 Organisasi Profesi Kesehatan protes kepada DPR RI, dan DPRD seluruh Indonesia, agar persoalan kebijakan kesehatan tidak "sembarangan" dirumuskan. Karena menyangkut nyawa manusia, kesehatan rakyat, dan kualitas mutu manusia Indonesia.

Kasus Suap di MA, KPK Tetapkan Hakim Agung, Panitera, dan Staf **Sebagai Tersangka**

JAKARTA - Kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) menemui babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut, Senin (28/11/2022).

Tiga orang tersangka itu yakni Gazalba Saleh, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI; Prasetyo Nugroho, Hakim Yustisial dan panitera pengganti pada kamar pidana Mahkamah Agung, ia juga asisten Hakim Agung Gazalba Saleh; Redhy Novarisza, staf Gazalba Saleh. Prasetyo ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Sementara Redhy akan ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 Gedung ACLC KPK. Sementara, Gazalba Saleh tidak hadir dalam penetapan sebagai tersangka.

Lebih lanjut, Deputy Bidang Penindakan KPK Karyoto mengatakan kasus ini adalah pengembangan dari penyidikan kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimiyati. "Dalam proses penyidikan perkara dengan tersangka SD dkk, KPK kemudian menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata



Ilustrasi KPK

Karyoto dalam konferensi pers, Senin (28/11/2022).

Dia mengatakan bahwa penahanan pada Prasetyo dan Redhy oleh selama 20 hari pertama, dimulai dari 28 November-17 Desember 2022. Untuk selanjutnya bisa dilakukan perpanjangan jika masih diperlukan penyidikan hingga persidangan.

Ia menyebut KPK juga telah memanggil Gazalba pada hari ini, namun yang bersangkutan meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang. "KPK berharap sikap kooperatif tersangka GS untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik pada waktu penjadwalan berikutnya yang suratnya segera dikirimkan," katanya.

Dalam kasus ini, Gazalba sebelumnya menggugat Praperadilan KPK ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Gazalba mengajukan permohonan praperadilan pada Jumat (25/11/2022). Permohonan teregister dengan nomor perkara: 110/Pid.Pra/2022/PNJKT.SEL.

Klasifikasi perkara adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka. Sidang perdana akan berlangsung pada Senin, 12 Desember mendatang.

Di sisi lain, KPK mengatakan ada penerimaan uang senilai Rp2,2 miliar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) ini. Karyoto menjelaskan kasus ini bermula pada awal 2022 lalu saat ada perselisihan di internal koperasi simpan

pinjam Intidana.

Kemudian terjadi pelaporan perkara pidana dan gugatan perdata yang berlanjut hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang.

Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT) lalu menunjuk Yosef Parera dan Eko Suparno sebagai pengacara selama dua proses hukum tersebut berlangsung.

"Terkait perkara pidana, HT melaporkan Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Intidana karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Terdakwa Budiman Gandi Suparman dinyatakan bebas," kata Karyoto.

Langkah hukum selanjutnya yaitu Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Karyoto mengatakan agar pengajuan kasasi jaksa dikabulkan, Heryanto menugaskan Yosep dan Eko untuk turut mengawal proses kasasi.

Menurut Karyoto, karena keduanya mengenal baik dan biasa bekerja sama dengan Desy Yustria, sebagai salah satu staf di Kepaniteraan MA untuk mengondisikan putusan, maka digunakanlah jalur itu dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar SGD202.000 setara dengan Rp2,2 miliar.

Untuk proses pengondisian putusan, Desy turut mengajak Nuranto Akmal yang juga staf di Kepaniteraan MA. Nuranto selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan Redhy selaku staf Gazalba dan Prasetyo selaku asisten Gazalba.

"Adapun salah satu anggota Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memutus perkara terdakwa Budiman Gandi Suparman saat itu adalah GS (Gazalba Saleh)," kata Karyoto.

Keinginan Heryanto, Yosep dan Eko terkait pengondisian putusan kasasi terpenuhi dengan diputusnya Budiman Gandi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama lima tahun.

Dalam pengondisian putusan kasasi tersebut sebelumnya juga diduga telah ada pemberian uang pengurusan perkara melalui Desy yang kemudian uang tersebut diduga dibagi diantara Desy, Nuranto, Redhy, Prasetyo dan Gazalba.

Lebih lanjut Karyoto mengatakan sumber uang yang digunakan Yosep dan Eko selama proses pengondisian putusan di MA berasal dari Heryanto. Berikutnya sebagai realisasi janji pemberian uang, Yosep dan Eko juga menyerahkan uang pengurusan perkara di MA tersebut secara tunai sejumlah sekitar SGD202.000 melalui Desy.

"Sedangkan mengenai rencana distribusi pembagian uang SGD202.000 dari Desy ke Nuranto, Redhy, Prasetyo dan Gazalba masih terus dikembangkan lebih lanjut oleh Tim Penyidik," kata Karyoto. Tersangka Heryanto, Yosep dan Eko sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Desy, Nuranto, Redhy, Prasetyo dan Gazalba sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (lut/cnn/tempo/dya)



Dalam proses penyidikan perkara dengan tersangka SD dkk, KPK kemudian menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka,"

KARYOTO Deputi Bidang Penindakan KPK



Presiden Jokowi Beber KTT G20 Hasilkan 226 Kesepakatan Proyek Bernilai Ratusan Miliar Dolar

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa pada konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali beberapa waktu lalu telah menghasilkan 226 kesepakatan proyek. Tak tanggung-tanggung nilainya mencapai ratusan miliar dollar.

Dalam posting di Instagram, Presiden Joko Widodo menyampaikan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali beberapa waktu lalu menghasilkan kesepakatan setidaknya 226 proyek yang bersifat multilateral senilai 238 miliar dolar AS dan 140 proyek bilateral dengan nilai 71,4 miliar dolar AS. Semua proyek ini perlu segera ditindaklanjuti dan dieksekusi dengan cepat.

“Untuk itulah, dalam rapat terbatas evaluasi pelaksanaan KTT G20 di Kantor Presiden, hari ini, saya meminta segera dibentuk gugus tugas untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang telah dicapai tersebut,” tandasnya, Senin (28/11/2022).

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa gugus tugas ini masing-masing menindaklanjuti secara detail kesepakatan dengan Amerika Serikat, dengan Persatuan Emirat Arab, dengan Korea Selatan, Jepang, RRT, dan seterusnya.

“Saya juga meminta jajaran pemerintah untuk mengawal percepatan berbagai komitmen investasi agar bisa terealisasi di lapangan. Misalnya, komitmen dari pemerintah Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure Investment sebesar 600 miliar dolar AS, lalu 20 miliar dolar AS untuk pengembangan kendaraan listrik berbasis fosil melalui Just Energy Transition Partnership. Begitu juga dengan komitmen investasi dari Jepang, Inggris, Korea Selatan untuk MRT Jakarta, Turki untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatra dan lain-lain,” sambungnya.

Sementara itu, KTT G20 pada 15-16 November 2022 lalu melahirkan 52 poin kesepakatan termuat dalam dokumen deklarasi berjudul G20 Bali Leaders Declaration. “Kepemimpinan Indonesia berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin G20, G20 Bali Leader Declaration yang awalnya diragukan banyak pihak. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf,” ujar Presiden Joko Widodo.

Pada poin pertama deklarasi, menyuarakan komitmen bersama para pemimpin negara G20 akan selalu menjadi forum premier kerja sama ekonomi global untuk menghadapi tantangan ekonomi dunia. Poin kedua dan ketiga menggambarkan sejumlah krisis yang telah dihadapi dan menjadi pengalaman bersama untuk menyelesaikan masalah mendatang.

Pada poin keempat menyatakan pentingnya perdamaian. Poin ke lima adalah komitmen untuk bersamasama menggunakan seluruh instrumen kebijakan untuk bangkit bersama dari berbagai permasalahan

ekonomi terkini. Adapun untuk poin keenam hingga 10, para pemimpin negara sepakat untuk menyikapi permasalahan ketahanan pangan global yang muncul akibat peperangan di Ukraina.

Pada poin ke-11, para pemimpin G20 menyepakati upaya penanganan bersama terhadap masalah perubahan iklim dan krisis energi yang diperparah oleh konflik geopolitik. Demikian pula pada poin ke-12 yang menjadikan Bali Compact dan Bali Energy Transition Roadmap sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah krisis energi.

Hingga poin ke-18, para pemimpin negara-negara G20 menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini. Terutama dengan mendukung the 2022 G20 Sustainable Finance Report serta pendorong kebijakan untuk transisi energi melalui insentif pembiayaan dan investasi.

Untuk poin ke-19 hingga 23, deklarasi yang disepakati para pimpinan negara anggota G20 ini tertuju pada komitmen untuk mempromosikan pemulihan bidang kesehatan yang berkelanjutan. Terutama setelah munculnya Pandemi Covid-19 yang disusul dengan wabah cacar monyet. Ini termasuk mendukung keberadaan Pandemic Fund, sampai transfer teknologi vaksin.

Poin ke-24 sampai dengan ke-26 kesepakatan deklarasi berkenaan tentang upaya bersama mengakselerasi transformasi ekosistem digital dan ekonomi digital. Poin ke-27 juga masih dalam cakupan digital, namun arahnya terhadap dukungan para pemimpin negara untuk mengimplementasikan G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments sebagai upaya untuk mendorong pengembangan sistem pembayaran lintas batas. Poin ke-28 juga terkait digitalisasi sistem keuangan yang lebih condong pada inklusi keuangan.

Barulah pada poin ke-29 hingga ke-35 menyepakati penggunaan instrumen kebijakan negara, khususnya di sektor moneter dan fiskal untuk mendukung ambisi kolektif pemulihan bersama dan pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Misalnya, dengan memastikan respons kebijakan fiskal tetap cekatan dan fleksibel mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Kebijakan makroprudensial juga memastikan akan terus dimanfaatkan untuk mengantisipasi meningkatnya risiko sistemik dari kondisi keuangan yang semakin ketat. Bank sentral negara-negara G20 juga dipastikan para pemimpin negaranya akan terus berkomitmen menjaga stabilitas harga.

Dari sisi pajak, disepakati banyak dukungan terhadap penerapan standar transparansi pajak secara internasional. Sedangkan untuk ketahanan arsitektur finansial secara luas, mereka mendukung arus aliran



modal yang berkelanjutan hingga pengembangan local currency capital markets. Tak terkecuali pengembangan Central Bank Digital Currency.

Pada poin ke-36 dan ke-37 sepakat untuk memperkuat peranan WTO untuk menjaga sistem perdagangan multilateral (MTS) yang berbasis aturan, tidak diskriminatif, bebas, adil, terbuka, inklusif, adil, berkelanjutan, dan transparan.

Poin deklarasi ke-39 hingga 41 mereka fokuskan untuk memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan yang inklusif, termasuk pekerja migran, dengan mengembangkan kapasitas manusia. Dilanjutkan dengan memastikan pengembangan kerja sama forum G20 dengan negara-negara berkembang seperti di kawasan Pasifik dan Karibia, maupun Afrika.

Mulai poin ke-44 hingga 45 para pemimpin negara-negara G20 mendeklarasikan komitmen untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitasnya sebagai salah satu alat penting untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka pun mendukung kolaborasi riset dan inovasi secara internasional.

Poin deklarasi ke-46 mereka khususkan untuk mendukung komitmen kesetaraan gender, hingga pemberdayaan perempuan sebagai salah satu pendukung pembangunan berkelanjutan. Sedangkan poin ke-47 adalah untuk menjaga sektor pariwisata yang selama pandemi Covid-19 paling terdampak, karena di dalamnya banyak sektor pendukung yang sangat tergantung dengan sektor itu seperti UMKM, hingga ekonomi kreatif.

Sejalan dengan itu, pada poin ke-48 memastikan penghormatan, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya masyarakat yang ada, termasuk komunitas lokal dan masyarakat adat. Pada poin ke-49 dan ke-50, para pimpinan negara-negara anggota G20 sepakat untuk memperkuat komitmen terhadap upaya antikorupsi termasuk melalui instrumen yang mengikat secara hukum, sambil memperbarui komitmen untuk tidak menoleransi korupsi. Ini juga berkaitan dengan upaya untuk memerangi pencucian

uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi.

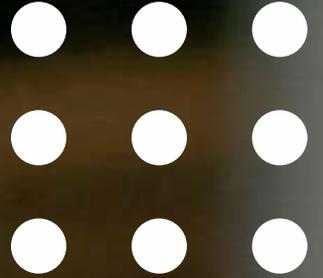
Sedangkan untuk sisa poin terakhir, yaitu poin ke-51 dan 52 lebih kepada komitmen untuk mendukung seluruh kesepakatan yang telah dicapai dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia, baik pada tingkat kelompok kerja yang spesifik hingga pertemuan antar menteri. Sebagaimana telah tercapai dalam "G20 Action for Strong and Inclusive Recovery". (lut/cnb/dya)



Saya juga meminta jajaran pemerintah untuk mengawal percepatan berbagai komitmen investasi agar bisa terealisasi di lapangan. Misalnya, komitmen dari pemerintah Amerika Serikat melalui skema Partnership for Global Infrastructure Investment sebesar 600 miliar dolar AS, lalu 20 miliar dolar AS untuk pengembangan kendaraan listrik berbasis fosil melalui Just Energy Transition Partnership. Begitu juga dengan komitmen investasi dari Jepang, Inggris, Korea Selatan untuk MRT Jakarta, Turki untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatra dan lain-lain,”

JOKO WIDODO
Presiden RI





C e r i t a
**NADIEM
MAKARIM**
Tentang Teater



MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengaku teater berbekas lama terhadap dirinya.

Aktivitas mengikuti ekstrakurikuler teater semasa masih SMA diakuinya memberi bekal ketika dirinya menjadi entrepreneur dan menteri.

Hal tersebut diucapkannya ketika berdialog dengan para guru dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional 2022 di JI Expo, Jakarta, Sabtu 26 November 2022.

Saat berdialog, Nadiem awalnya berpandangan perlunya ditumbuhkan sikap cinta belajar sepanjang hayat kepada peserta didik.

Untuk mencapainya, diperlukan situasi belajar yang menyenangkan bagi peserta didik.

Salah satunya adalah melalui penggalan minat dan bakat siswa yang terintegrasi dalam proses pembelajaran.

Nadiem kemudian menyebutkan tentang mata pelajaran yang berdampak lama kepada dirinya yakni teater.

"Saya ingat pernah ditanya tentang pelajaran di SMA yang paling berdampak? Kebanyakan orang mungkin menjawab ekonomi atau mungkin Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris," katanya.

"Enggak. Sebenarnya satu mata pelajaran yang paling punya dampak ke karier saya sebagai entrepreneur atau menteri adalah teater," katanya.

Nadiem menambahkan, teater berdampak kepada dirinya karena teater mengajarkan hal-hal semacam kolaborasi dan keberanian tampil dengan risiko dipermalukan oleh orang lain.

"Dari situlah saya belajar public speaking dan dari situ terasah. Jadi, jangan pernah lupa bahwa dari setiap anak di ruang-ruang kelas kita, ada talenta-talenta khusus yang hanya bisa keluar kalau kita punya paradigma diferensiasi," ujarnya.

"Kalau kita punya paradigma, kalau setiap anak itu berbeda dan kita (guru) bisa melakukan treatment yang

berbeda. Walaupun kelihatannya repot ya, tetapi kalau kita mencoba, ternyata, eh, bisa. Begitu," ujarnya.

Praktik baik

Dalam acara puncak HGN 2022, Nadiem Makarim berbincang dengan para guru dari berbagai wilayah.

Selaku moderator, Nadiem menggali praktik baik yang mereka lakukan dalam menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan di sekolah sesuai potensi peserta didik.

Guru pertama yang diberi kesempatan untuk bercerita adalah I Ketut Budiarsa, Kepala SDN 09 Padangsembian, Bali.

Ia memilih melakukan pendekatan yang humanis sebagai strategi awal untuk merangkul dukungan para guru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

"Saya lakukan pendekatan dan pendampingan dengan meyakinkan para guru senior khususnya untuk bersama-sama belajar," ujarnya.

"Saya tekankan, saya tidak akan meninggalkan mereka bahkan akan bersama mereka menghadapi tantangan yang ada," ujarnya.

Menutup sesi dialog, Nadiem mengajak segenap elemen pendidikan, khususnya para pendidik agar selalu semangat untuk berkolaborasi dan bergotong royong.

"Ini (transformasi pendidikan) tidak bisa hanya menjadi kebijakan. Ini harus menjadi gerakan dari bawah. Untuk itulah, kita harus sering ngumpul, berdiskusi, bergerak," ungkapnya.

"Untuk para guru, jangan lupa untuk banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya," ujar Nadiem.

Profil Nadiem Makarim

Nadiem Makarim atau yang lebih dikenal dengan panggilan Nadiem lahir di Jakarta 4 Juli 1984 dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie. Ia adalah anak lelaki satu satunya dari pengacara ternama keturunan Arab asal Pekalongan, Jawa Tengah, Nono Anwar Makarim.

Ayahnya seorang intelektual dan lawyer dengan gelar Doktor ilmu hukum lulusan Harvard.

Meski Nadiem adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, ia tidak berperilaku manja. Justru ia tetap menunjukkan kemandiriannya. Setelah meluluskan jenjang pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta, ia melanjutkan SMA-nya di Singapura. Bahkan tak hanya di situ kemandiriannya, lulus dari Singapura, ia pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya di Brown University Amerika Serikat.

Ia berhasil mendapat gelar BA di jurusan International Relations. Ia pun sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Tidak puas dengan ilmu yang dimiliki, ia melanjutkan pendidikan layaknya sang ayah dan mengambil masternya di Harvard Business School dan mendapatkan gelar MBA (Master of Business Administration).

Pria lulusan Harvard ini memilih untuk kembali ke tanah airnya Indonesia, Nadiem tidak membutuhkan waktu yang lama untuk terjun ke dunia kerja. Berbekal ijazah yang dimilikinya, Nadiem direkrut di Management Consultant di McKinsey & Company, sebuah lembaga konsultan ternama yang berbasis di Jakarta. Di perusahaan ini, ia menghabiskan waktu 3 tahun.

Selain itu, ia juga bekerja sebagai Co-founder dan Managing Editor di

Zalora Indonesia kemudian menjadi Chief Innovation officer kartuku.

Dari latar belakang seorang ayah dan ibu yang bukan berasal dari kalangan pengusaha, Nadiem banting setir memilih jalur yang berbeda dari latar belakang keluarganya itu, naluri bisnis Nadiem memang sangat tajam. Ia dapat melihat sebuah peluang bisnis yang cocok dan dapat membantu banyak warga Indonesia.

Bermula dari pengalaman pribadinya kembali ke Jakarta untuk bekerja yang mempertemukan dirinya dengan kecemasan dan dengan jiwa entrepreneurship itulah, pada 2011, ia mulai merintis perusahaan milik sendiri yang kemudian dikenal dengan nama GO-JEK, pesan ojek secara online.

Nadiem mengaku ia angkat kaki dari perusahaan sebelumnya hanya karena ia tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Ia ingin mengontrol dirinya sendiri. Nadiem dengan cerdas memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk kemudahan para pelanggan GO-JEK-nya. Aplikasi GO-JEK pun sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang.

Dalam perkembangannya, seperti dilihat dalam akun Go-Jek, GO-JEK tak hanya sebagai transportasi online penumpang, tapi ia berkembang menjadi jasa antar barang (Go-Send), makanan (Go-Food), alat kesehatan, massage, dan kebersihan (Go-Clean).



ASAM URAT BISA MENYERANG ANAK MUDA, INI CARA MENGOBATINYA



PENYAKIT asam urat yang dalam istilah medis disebut sebagai gout, sering dikaitkan dengan usia yang lebih tua.

Laman Direktur Jenderal Pelayanan Kemenkes menyebut, penyakit ini lebih sering menyerang pria yang berusia lebih dari 30 tahun dan pada wanita di usia menopause.

Tapi apakah asam urat dapat menyerang orang di usia muda?

Laman Direktur Jenderal Pelayanan Kemenkes mengungkap, asam urat merupakan penyakit radang sendi yang terjadi akibat adanya penumpukan kristal asam urat.

Tempatnya biasanya di jari kaki, pergelaa

ngan kaki, lutut, serta yang paling umum di jempol kaki.

Penyebab penumpukan kristal asam urat ini adalah kondisi tertentu seperti diabetes, gangguan sindrom metabolik, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit tiroid, anemia, hipertensi, tinggi kolesterol, obesitas dan sleep apnea. Semua kondisi tersebut dapat menyebabkan tubuh menghasilkan asam urat berlebihan.

Faktor risikonya seperti mempunyai keluarga dengan riwayat penyakit ini, pernah alami cedera atau pembedahan, mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula, sering mengonsumsi makanan yang kaya akan purin yang

dapat memicu asam urat seperti daging merah, jeroan hewan, ataupun ikan kaya akan omega-3.

Maka karena penyebabnya juga berkaitan dengan gaya hidup, laman ners.unair dalam artikel berjudul "Asam Urat di Usia Muda" menyebutkan, asam urat dapat diderita oleh orang dengan usia muda jika tidak mengatur pola makan dan merasa bebas untuk mencoba banyak hal.

BAGAIMANA CARA MENGOBATI ASAM URAT PADA USIA MUDA?

Laman Direktur Jenderal Pelayanan Kemenkes menjelaskan, pengobatan penyakit asam urat adalah dengan mengonsumsi obat asam urat. Jumlah pemberian obat ini bergantung pada tingkat keparahan penyakit yang diderita.

Ada beberapa rekomendasi obat asam urat alami yang cukup menarik untuk anak muda, seperti konsumsi jus ceri, jahe, cuka sari, jus lemon dan kunyit dan seledri ataupun biji seledri.

Kini banyak influencer makanan yang kerap membagikan tips untuk mengolah makanan sehat agar menjadi lebih menyenangkan saat dikonsumsi. Beberapa bahan alami tadi bisa digunakan dengan cara-cara

tersebut.

Namun, perubahan gaya hidup juga diperlukan. Tidak hanya untuk mencegah penyakit ini timbul, perubahan gaya hidup juga bisa mengurangi gejala yang timbul ketika sudah kadung terserang penyakit asam urat.

PERUBAHAN GAYA HIDUP YANG DIMAKSUD MELIPUTI:

Mengurangi asupan alkohol:

Meskipun masih dalam usia muda, tetapi alkohol dapat memicu banyak penyakit.

Menurunkan berat badan:

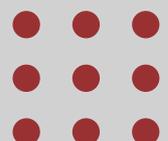
Salah satu cara mengobati asam urat adalah dengan menurunkan berat badan.

Berhenti merokok:

Sama seperti alkohol, merokok juga menimbulkan sejumlah masalah kesehatan yang merugikan (Bisnis)



ASAM URAT



iQOO 11 Smartphone Snapdragon 8 Gen 2 Pertama di Indonesia



iQOO Indonesia secara resmi mengonfirmasi kehadiran iQOO 11 di Indonesia. Perangkat ini juga menjadi smartphone pertama di Indonesia yang diotaki Snapdragon 8 Gen 2.

Senior Product Manager iQOO Indonesia Praditya Putra mengatakan, ponsel ini akan meluncur pada Desember 2022 dan siap membawa pengguna ke level eksplorasi selanjutnya dengan teknologi berperforma ekstrem dan daya kerja yang sangat efisien.

"Kami bangga akhirnya dapat membawa iQOO 11 sebagai smartphone pertama di Indonesia yang ditenagai Snapdragon 8 Gen 2 yang baru saja diluncurkan," katanya, Sabtu (26/11/2022).

Dia menjelaskan, iQOO 11 dirancang khusus untuk jadi revolusi

flagship smartphone yang membawa pengalaman luar biasa dan performa terbaik untuk gaming yang spektakuler bagi konsumen yang melekat teknologi.

Dengan Snapdragon 8 Gen 2 pada dapur pacunya, sambung Praditya, iQOO 11 akan memiliki kinerja yang efisien, mulus, dan berperforma tinggi.

"Processor 4nm canggih dari TSMC ini didukung GPU Adreno 740. Platform ini juga dibuat dengan desain CPU Qualcomm Kryo 1+[2+2]+3 baru, yang terdiri dari 1 prime core, 4 gold core dan 3 efficiency core," terang dia.

Lebih lanjut, Praditya memerinci, iQOO 11 juga hadir dengan teknologi Dual Flagship-Chip.

Tidak hanya dengan Snapdragon 8 Gen 2, smartphone ini ditenagai juga

oleh V2 Chip eksklusif buatan sendiri untuk memaksimalkan efisiensi smartphone.

Adapun, V2 Chip ini adalah in-display chipset independen untuk mendukung Game Frame Interpolation sehingga pengguna dapat menikmati visual yang jernih dan lancar dengan frame rate tinggi dan konsumsi daya lebih rendah terutama saat bermain game.

"iQOO 11 dikembangkan secara khusus dengan banyak teknologi terobosan terutama pada konfigurasi chipsetnya," imbuh Praditya.

Qualcomm mengklaim kinerja kecerdasan buatan (AI) di Snapdragon 8 Gen 2 bakal bisa mendongkrak fungsi kamera serta pemrosesan bahasa yang lebih mumpuni dibanding generasi sebelumnya.

Kemampuan tersebut hadir berkat adanya fitur Snapdragon Smart yang didukung prosesor Qualcomm Hexagon untuk AI, serta teknologi Qualcomm Sensing Hub dan Snapdragon Sight.

Di samping itu, SoC Snapdragon 8 Gen 2 membawa sejumlah fitur baru yang akan meningkatkan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna smartphone. Salah satunya adalah dukungan codec Av1.

Menurut Qualcomm, codec ini menawarkan peningkatan kualitas video yang lebih tinggi, namun dengan ukuran file yang 30 persen lebih efisien ketimbang video codec H.265.

Hal baru lainnya yang membekali

Snapdragon 8 Gen 2 mencakup Snapdragon Elite Gaming dengan teknologi Ray Tracing, WiFi 7, chip modem 5G Snapdragon X70 dengan kecepatan download mencapai 10 Gbps, dan masih banyak lagi.

Bahkan, kemampuan itu tetap berfungsi meski ponsel dalam kondisi offline atau tidak tersambung internet.

Kemampuan tersebut hadir melalui fitur Snapdragon Smart dengan Cognitive AI yang dapat mendeteksi suara dan tulisan.

Melalui sebuah demonstrasi, Qualcomm memamerkan kemampuan tersebut. Dalam demo ini sebuah smartphone dengan aplikasi khusus yang digunakan untuk uji coba, dapat memahami percakapan dalam bahasa Inggris (Bisnis)



OBAT TERMAHAL

DI DUNIA,

HARGANYA

RP52 MILIAR



REGULATOR kesehatan AS menyetujui peredaran obat terapi gen pertama untuk hemofilia, dengan harga fantastis yakni US\$3,5 juta Rp52 miliar sekali pengobatan. Obat ini untuk gangguan pembekuan darah.

Food and Drug Administration memberikan izin edar pada Hemgenix, pengobatan IV untuk orang dewasa dengan hemofilia B, bentuk kelainan genetik yang kurang umum yang terutama menyerang pria.

Pembuat obat CSL Behring, yang berbasis di Pennsylvania, mengumumkan label harga US\$3,5 juta tak lama setelah persetujuan FDA, dengan mengatakan bahwa obatnya pada akhirnya akan mengurangi biaya perawatan kesehatan karena pasien

akan mengalami lebih sedikit pendarahan dan membutuhkan perawatan pembekuan yang lebih sedikit.

Menurut sebuah penelitian yang dikutip oleh National Library of Medicine, harga tersebut menjadikan Hemgenix obat termahal di dunia, melampaui terapi gen Zolgensma Novartis untuk atrofi otot tulang belakang (SMA), yang harganya sekitar US\$2 juta per dosis.

Seperti kebanyakan obat-obatan di AS, sebagian besar biaya pengobatan baru akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, bukan pasien, termasuk program swasta dan program pemerintah.

Setelah beberapa dekade penelitian, terapi gen telah mulai membentuk kembali pengobatan kanker dan penyakit langka yang diturunkan dengan obat-obatan yang dapat memodifikasi atau memperbaiki mutasi yang tertanam dalam kode genetik manusia.

Hemgenix adalah pengobatan pertama untuk hemofilia dan beberapa pembuat obat lain sedang mengerjakan terapi gen untuk bentuk gangguan yang lebih umum, hemofilia A.

"Persetujuan hari ini memberikan pilihan pengobatan baru untuk pasien dengan hemofilia B dan merupakan kemajuan penting dalam

pengembangan terapi inovatif," kata Dr. Peter Marks dari FDA dilansir dari CBS News.

Agensi tidak merinci berapa lama obat itu bekerja. Tapi CSL Behring mengatakan obat akan mengurangi pendarahan dan peningkatan pembekuan darah selama bertahun-tahun.

Penyebab Hemofilia

Hemofilia terjadi akibat mutasi genetik yang menyebabkan darah kekurangan faktor pembekuan VIII

dan IX. Kekurangan faktor tersebut menyebabkan darah sukar membeku sehingga perdarahan sulit berhenti.

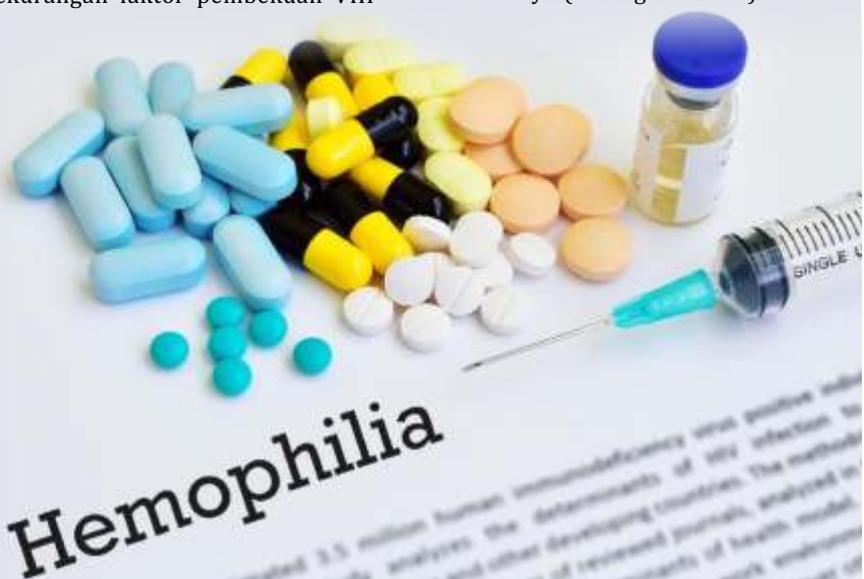
Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia mempengaruhi kromosom X. Kelainan pada kromosom X kemudian diturunkan oleh ayah, ibu, atau kedua orang tua kepada anak.

Hemofilia yang bergejala biasanya terjadi pada laki-laki. Anak perempuan lebih sering menjadi pembawa (carrier) gen abnormal yang berpotensi untuk diwariskan kepada keturunannya. (Berbagai Sumber)

GEJALA HEMOFILIA

Gejala utama hemofilia adalah darah yang sukar membeku sehingga menyebabkan perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama. Selain itu, penderita hemofilia bisa mengalami keluhan berupa:

- Perdarahan yang sulit berhenti, misalnya pada mimisan atau luka gores
- Perdarahan pada gusi
- Perdarahan yang sulit berhenti setelah operasi, misalnya setelah sunat
- Darah pada urine dan tinja
- Mudah mengalami memar
- Perdarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada sendi siku dan lutut



Tumpukan Warisan....(dari hal 1)

PRESIDEN Jokowi mengirim surat presiden (Surpres) mengenai pergantian Panglima TNI. Surpres diantar langsung oleh Mensesneg Pratikno ke Gedung DPR Senayan, hari ini (28/11). Dalam surpres itu, Jokowi mengusulkan calon tunggal Panglima TNI yaitu KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Ia diusulkan menggantikan Panglima TNI saat ini, Andika Perkasa, yang pensiun pada 21 Desember 2022.

"Nama yang diusulkan Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono atau KSAL saat ini," kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11).

Puan mengungkapkan sebelum masa sidang berakhir, DPR akan segera melakukan rapat paripurna untuk mengesahkan Panglima TNI baru. "Sebelum penutupan (masa sidang) tanggal 15, terkait dengan hal ini pergantian Panglima TNI yang akan disahkan oleh paripurna DPR," ungkapnya

Pratikno berharap nama Panglima TNI yang akan menggantikan Andika Perkasa dapat diterima oleh presiden sebelum masa reses DPR. Reses DPR periode ini di 15 Desember. "Dan kami sangat-sangat berharap bahwa surat dari DPR bisa diterima oleh bapak presiden dalam waktu secepatnya, tentu saja sebelum masa reses masa sidang DPR ini berhenti dan memasuki masa reses sudah bisa diterima bapak presiden," kata Pratikno.

Pratikno tidak menepis ketika ditanya lagi apakah rotasi 'giliran' matra menjadi pertimbangan Jokowi menentukan Panglima TNI saat ini. Pratikno menyebut hal itu bisa jadi salah satu pertimbangan Jokowi. "Ya (rotasi matra) bisa jadi salah satu pertimbangannya. Saya kira itu salah satunya pertimbangannya," kata dia.

Untuk diketahui, telah ada dua matra yang menjadi Panglima TNI di era Jokowi. Pertama dari Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto dan kedua dari Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Sementara Angkatan Laut belum pernah menjabat di masa kepemimpinan Jokowi. Mensesneg Pratikno merespons hal tersebut.

Dia juga berterimakasih kepada DPR yang berkomitmen untuk

memproses surpres dengan jangka waktu yang cepat. "Saya atas nama pemerintah, atas nama bapak presiden sampaikan terima kasih atas komitmen ketua dan bapak-bapak wakil ketua untuk proses surpres ini dalam waktu secepat-cepatnya," tandas dia.

Catatan Evaluatif untuk TNI

Menuju momentum pergantian jabatan itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sudah punya beberapa catatan evaluatif terhadap kinerja institusi TNI. KontraS menilai di bawah kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa, tugas institusi TNI masih banyak yang dianggap belum tuntas.

Koordinator kontraS, Fatia Maulidiyanti mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menuliskan dan mengirimkan berbagai catatan kritis kepada DPR dan Pemerintah. Catatan itu dibuat agar DPR dan pemerintah secara serius dapat meninjau masalah pada tubuh TNI.

"Sayangnya, ragam permasalahan tersebut bahkan tak mendapatkan perhatian Panglima TNI (Andika Perkasa) dalam setahun ke belakang seperti halnya kembalinya TNI di domain sipil dan reformasi peradilan militer," tulis Fatia, seperti dikutip dari laman resmi kontraS, Senin (28/11).

Pertama, belum berjalannya reformasi peradilan militer. Selama setahun lebih masa kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, perbaikan terhadap sistem penegakan hukum formil dalam tubuh militer tak kunjung ditunaikan.

Kemudian kultur kekerasan yang belum berhasil diminimalisir. "Sejak berakhirnya rezim otoritarian pada masa Orde Baru, militer di Indonesia belum berhasil lepas sepenuhnya dari tendensi arogansi yang berbuah pada tindakan kekerasan di lapangan," tulisnya.

Ada juga problematika Perwira tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) non-job yang jumlahnya membengkak. Diketahui, sekitar 500an Kolonel dan 70an Pati kini non-job, angka ini tentu lebih besar jika melihat Pamen pada pangkat Mayor dan Letnan Kolonel.

Selanjutnya, nihilnya mekanisme

vetting atau uji kompetensi serta pemeriksaan dan pertimbangan latar belakang secara transparan bagi Perwira tinggi yang ditunjuk untuk menduduki jabatan strategis." Pada masa Jenderal Andika Perkasa, beberapa Perwira tinggi dengan latar belakang penuh masalah masih dapat menduduki jabatan strategis contohnya mantan anggota Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis dan penghilangan paksa Untung Budiharjo yang menjadi Panglima Kodam Jaya, penunjukkan Perwira tinggi untuk menduduki jabatan tertentu terkadang juga ditengarai berbasis subyektivitas antar-angkatan dan antar-satuan."

Penunjukkan anggota TNI aktif sebagai PJ Kepala Daerah juga dipermasalahkan. Tercatat hingga Oktober 2022 setidaknya terdapat dua kepala daerah yang justru berangkat dari unsur TNI yaitu Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai PJ Kepala Daerah Bupati Seram bagian Barat dan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh.

Militer juga tak hentinya terlibat dalam ragam konflik agraria. Setiap tahunnya KontraS mencatat upaya keterlibatan TNI dalam konflik agraria masih terus berlanjut dalam wujud penerahan kekuatan dan okupasi lahan

Kemudian berlanjutnya pendekatan militeristik di Papua juga menjadi warisan masalah lainnya. "Setelah dilantik, Panglima TNI selanjutnya juga harus memutar otak guna memutus konflik berkepanjangan di Papua. Selama ini, rantai kekerasan terus berlanjut di bumi Cenderawasih sebagai akibat dari pendekatan militeristik yang sangat kental," katanya.

Terakhir, langgeng dan masifnya praktek bisnis militer juga masih kuat terlihat. Keterlibatan prajurit militer dalam mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain selain dari APBN terus berlanjut di era kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa. Sebagai contoh, TNI kembali melanjutkan pola pembuatan perjanjian dengan perusahaan terkait dengan pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas).

Untuk diketahui, sebagai penyelenggara negara, Yudo sudah beberapa kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Seperti pada

laporan periodik untuk tahun 2020, dia melaporkan punya harta Rp 11.364.872.854. Sementara untuk laporan untuk periodik 2021, hartanya naik menjadi Rp 17.970.088.086.

Hal senada diungkapkan, Ketua Badan pengurus Centra Initiative dan Peneliti Senior Imparsial Al Araf. Dia menilai Panglima TNI yang baru nantinya harus mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua. Menurut Araf, Panglima TNI yang baru nantinya harus menentukan skala prioritas.

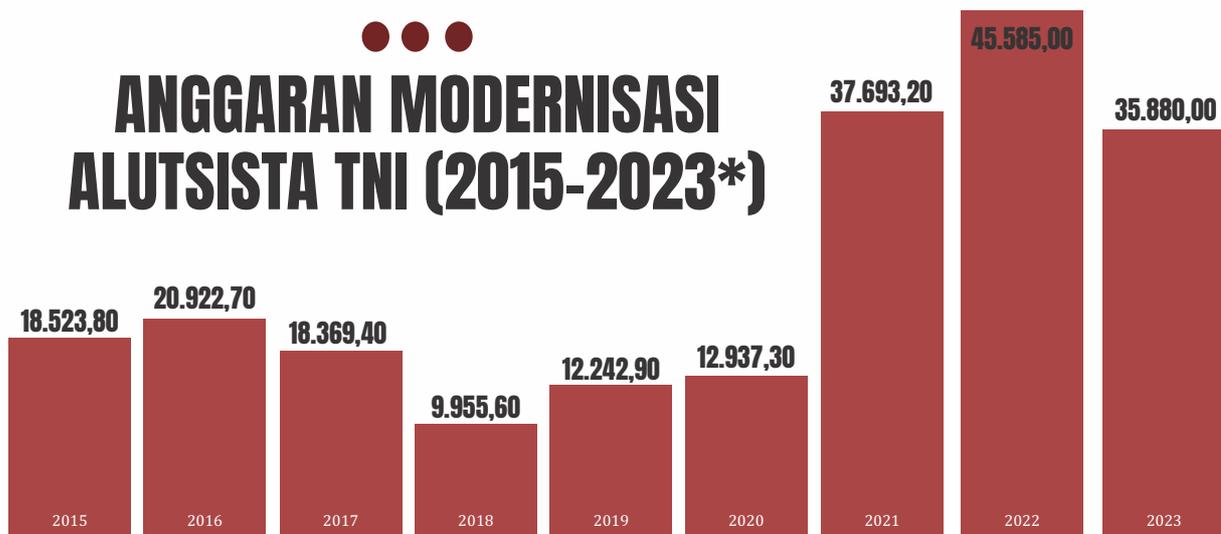
Dalam jangka pendek, masalah yang penting untuk diselesaikan Panglima TNI yang baru adalah mengubah pendekatan keamanan di Papua. "Apa skala prioritas Panglima TNI yang baru? Menurut saya, paling tidak harus bisa menjelaskan ke DPR apa skala prioritas dalam satu tahun ini yang bisa diselesaikan dan dituntaskan," kata Al Araf. "Buat saya yang paling sangat penting dan jangka pendek yang harus diselesaikan mengubah pendekatan keamanan di Papua dari represif menjadi persuasif. Itu tugas penting Panglima TNI untuk melakukan evaluasi peningkatan keamanan di Papua," sambungnya.

Sementara, Anggota Komisi 1 DPR Fraksi Golkar Dave Laksono mengamini tugas berat bagi Panglima TNI baru. Dave mengatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh KSAL Yudo Margono adalah membangun kekuatan angkatan laut untuk membangun tol laut. "Banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Pertama, sesuai dengan konsep presiden untuk membangun tol laut, itu harus membangun kekuatan angkatan laut," kata Dave.

Dalam melakukan tugasnya, kendala tak mungkin dipungkir. Salah satu kendala besar yang dihadapi adalah kekurangan dana. Pasalnya anggaran Minimum Essential Force (MEF) bisa mencapai Rp800 triliun, tetapi anggaran yang disetujui untuk Kementerian Pertahanan hanya Rp134 triliun.

"Memang dari situ saja sudah terlihat bahwa dana yang disiapkan hanya sepertiganya," ujar Dave. Namun demikian, Dave yakin bahwa kendala ini dapat dihadapi. Menurutnya, Panglima TNI harus memutar otak untuk memajukan kekuatan militer menggunakan langkah-langkah alternatif. (wid,ist,rls,ant/dya)

ANGGARAN MODERNISASI ALUTSISTA TNI (2015-2023*)



Angkatan Darat 16 Orang

Angkatan Udara 3

Angkatan Laut 2

JUMLAH PANGLIMA TNI BERDASARKAN MATRA (1945-2021)

Sinarto: Pariwisata, Hajat Besar yang Perlu Dukungan Semua Pihak



Foto-foto: Berbagai kegiatan dan narasumber dalam acara peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata di Desa Wisata Aengtongtong Sumenep Madura, pada 26 November 2022. (Istimewa)



SUMENEP– Pariwisata merupakan 'hajat besar' sehingga semua pihak harus terlibat. Diperlukan koordinasi dan sinergi pelayanan mulai dari kedatangan wisatawan di Bandara, perjalanan, akomodasi, konsumsi, kunjungan ke obyek wisata, faktor keamanan bahkan sampai koneksi internet.

Maka itu tak heran bila Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Sinarto, Skar MM mendorong kolaborasi dan sinergi semua pihak. Hal itu dikatakan Sinarto dalam sambutannya pada kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata di Desa Wisata Aengtongtong Sumenep Madura, pada 26 November 2022.

Sinarto mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) sangat mengapresiasi keberadaan desa wisata. Apalagi banyak desa wisata Jatim yang masuk dalam 300 besar desa wisata versi Kemenparekraf yang

dinobatkan pada 2021 lalu. "Karena itu perlu adanya pembinaan dan perhatian lebih serius terhadap desa wisata ini," lanjut Sinarto. Seperti diketahui, ada rumus baku di sektor pariwisata, yakni akses, akomodasi, amenitas, dan atraksi.

Dengan adanya desa wisata yang berdaya, dia optimistis akan makin mudah membangkitkan ekonomi masyarakat. "Adanya desa wisata yang baik akan dapat memajukan dan menumbuhkan perekonomian desa tersebut. Ekonomi akan dapat tumbuh dan bergerak di desa-desa melalui kepariwisataan," imbuhnya.

Sinarto mengataka, semula banyak hal yang dianggap sepele di suatu desa namun dapat menarik minat wisatawan. "Dan salah satu model pembangunan pariwisata yang mengkolaborasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku adalah desa wisata," kata Sinarto.

Pengembangan desa wisata mendorong berbagai upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi keunikan. Mulai dari budaya lokal, makanan tradisional dan nilai-nilai kearifan masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu pemangku

kepentingan, perlu difasilitasi dan didorong untuk berpartisipasi dan berperan aktif sebagai subjek atau pelaku, maupun sebagai penerima manfaat dalam pengembangan kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan tidak akan berjalan dan berhasil dengan baik tanpa adanya kerjasama sinergis antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media. Semua pihak harus memiliki kesatuan pandang dan dapat memahami paradigma pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Sementara itu Kepala Bidang Destinasi Dra. Susiati, MM mengatakan tujuan diadakannya acara tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengelola desa wisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal. "Ini sebagai percepatan pemberdayaan masyarakat pengelola desa wisata dengan mengembangkan kekuatan potensi SDM agar mampu mengembangkan pengelolaannya menjadi desa wisata yang maju dan mandiri. Serta memberikan gambaran dampak positif dari sektor kepariwisataan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat utamanya di desa wisata," katanya.

Sedangkan narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Ahmad Suhaib, SE dari Asosiasi Desa Wisata (ASIDEWI) memberikan materi Tata Kelola & Kelembagaan Desa Wisata; Achmad Vicky Faisal, S. Kom Asosiasi

Pariwisata Madura (ASPRIMO) menjelaskan tentang Digital Marketing dan Jejaring dan Sabar Soeastono dari Pokdarwis Jatim yang berbicara mengenai strategi inovasi desa wisata berkelanjutan.

Dengan dukungan semua pihak, meraih target jumlah wisatawan bukan hal yang sulit diraih. Indonesia, termasuk Jawa Timur adalah negeri yang kaya akan destinasi wisata alam dan budaya. Secara umum industri pariwisata merupakan gabungan dari produk barang dan jasa. Konsumen industri pariwisata, biasa disebut wisatawan, tidak hanya membeli produk barang berupa makanan, minuman, dan cinderamata, tetapi juga pengalaman bagaimana mereka menikmatinya. (ADV)

